



BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 ini secara garis besarnya berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2016. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ini mendasarkan pada amanat Peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-UndangUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010-2015;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016.

Selain itu pula penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir juga mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Ilir (2010 – 2015) dan berpedoman dengan Perjanjian Kinerja Kabupaten Ogan Ilir 2016.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2016 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2010-2015.

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2016 serta sebagai wujud Akuntabilitas Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja pemerintah Kabupaten Ogan Ilir selama Tahun Anggaran 2016;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2016
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

1. Kedudukan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

Kedudukan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir masih berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu sebagai Daerah Otonom, yakni kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir adalah menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi di Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah ada 25 urusan wajib yang diampu oleh 33 SKPD/Unit dan 8 Urusan Pilihan yang diampu oleh 4 SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dengan harapan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dapat lebih berperan dan lebih mampu dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip dan semangat otonomi daerah yang bertanggung jawab.

Selanjutnya untuk melaksanakan urusan Daerah di maksud telah dijabarkan menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang bertujuan mewujudkan aspirasi masyarakat secara profesional,transparansi, partisipatif dan akuntabel. Adapun tugas dan fungsi SKPD Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga lain, Kecamatan dan Kelurahan.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintahan daerah.
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara Administrasi bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.

c. Dinas Daerah

Sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Lembaga Teknis Daerah.

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Penyediaan pelayanan penunjang
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Kecamatan

Kecamatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

6. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan di pemerintahan Kelurahan.

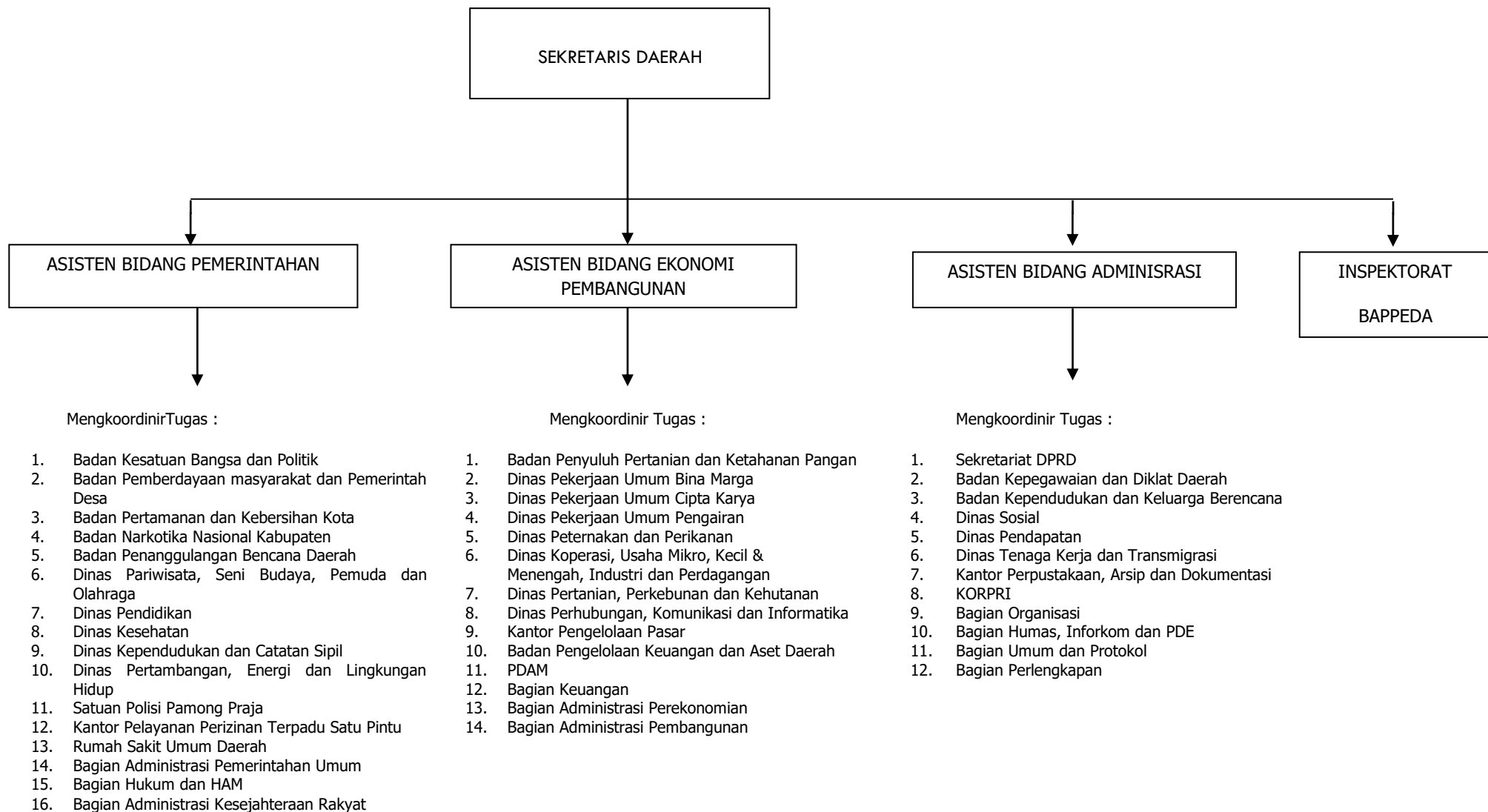
f. Kelurahan.

Pemerintahan Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dengan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari Sekretariat Daerah yang membawahi 3 Asisten dan 10 Bagian, Sekretariat DPRD, 15 Dinas Daerah, 14 Lembaga Teknis Daerah, 16 Kecamatan, 241 Kelurahan/Desa, dan 72 Unit Pelaksana Teknis. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut maka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008. Susunan Kelembagaan ini dilaksanakan secara efektif di tahun 2009 hingga tahun 2016

Bagan. 1.1 Bagan Struktur Organisasi



4. Personil/Pegawai.

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai dengan analisa jabatan dan kompetensi. Sampai dengan akhir tahun 2016 pemerintah Kabupaten Ogan Ilir didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 6372 orang. Untuk memberi gambaran yang lengkap dan terperinci mengenai keadaan pegawai Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut :

Tabel. 1 Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat KORPRI

NO	SKPD	GOLONGAN PANGKAT														JUMLAH		
		I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b		IV/c	IV/d
1.	Sekretariat Daerah					8		9	2	17	7	11	20	24	24	15	1	138
2.	Sekretariat DPRD					1	1	2		7	1	4	8	1	2			27
3.	Sekretariat KPU												1	2	1			4
4.	Sekretariat KORPRI										1		2					3
	Total					9	1	11	2	24	9	15	31	27	27	15	1	172

Tabel. Jumlah Pegawai Dinas-Dinas Daerah

NO	SKPD	GOLONGAN PANGKAT																JUMLAH		
		I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d			
1.	Dinas Tenaga Kerja dan Trans							2		3		3	4	5	5	3	1	26		
2.	Dinas Kependudukan dan Capil									1		3	4	2	3	8	2	2	25	
3.	Dinas Kesehatan				3			36	4	84		42	343	159	82	106	15	2	876	
4.	Dinas Kop dan UMKM Industri dan Perdagangan							1				1	4		3	6	4	2	1	22
5.	Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olahraga							1		1		2	1	1	4	5	2	1	18	
6.	Dinas PU dan BM							2	1	4		1	5	8	7	5	5	1	39	
7.	Dinas PU dan Cipta Karya							1				1	6	8	5	4	2	2	29	
8.	Dinas Pendapatan Daerah							6	1	1		3	6	7	10	6	4	1	45	
9.	Dinas Pendidikan	1	1	10	2	134	96	144	38	571	716	438	493	1432	34			4110		
10.	Dinas Perhubungan dan KOMINFO	1		1		6			4	8	15	5	11	2	1	1		59		
11.	Dinas Pertambangan Energi dan LH									1		3	2	4	4	3	2	1	20	
12.	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan							1		1		2	5	9	10	21	4	1	54	
13.	Dinas Peternakan dan Perikanan									1		1	3	3	3	14		4	29	
14.	Dinas PU Pengairan			1	1	2				1		2		2	7	4	1	1	22	
15.	Dinas Sosial									2		7		7	6	4	1		27	
	Total	2	1	15	3	192	102	246	100	974	934	588	701	1482	54	6	01	5400		

Tabel 2 . Jumlah Pegawai Lembaga Teknis

NO	SKPD	GOLONGAN PANGKAT														JUMLAH		
		I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b		IV/c	IV/d
1.	Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah					3		2		5	3	8	3	10	2	1		37
2.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana								1	2	5	8	12	12	1			41
3.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					5	1			1		5	6	6				24
4.	Badan Narkotika Daerah					1							1	1				3
5.	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan			2		15	3	6	2	15	13	14	20	7	8			105
6.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PMD					1			1	3	4	5	6	4	1	1		26
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah										1	2	1		1			5
8.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah					2			6	7	6	7	6	3	1			38
9.	Bappeda					1		2	2	4	7	7	7	6	2	1		39
10.	Badan Pertamanan dan Kebersihan Kota					1			3		4	1	6	5		1		21
11.	Inspektorat					2		2	1	2	7		9	10	5	3		41
12.	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu					1		3	1	4	3	2	2			1		17
13.	Kantor Pengelolaan KTM										1	1	3		1			6
14.	Kantor Pengelolaan Pasar							1			2	3		1				7
15.	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi									1	2	2	1	1	1			8
16.	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja					11	1			1		6			1			20
17.	PDAM														1			1
18.	Rumah Sakit Umum Daerah							10	12	33	15	17	6	3	1	1		98
	Total			2	0	40	5	26	29	78	73	88	89	56	26	9		495

Tabel 3 . Jumlah Pegawai Kecamatan dan Kelurahan

NO	SKPD	GOLONGAN PANGKAT																JUMLAH
		I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	
1.	Kantor Camat Indralaya			1			3	4	1		5		5	1				20
2.	Kantor Camat Indralaya Selatan						2				2	1	2	2				10
3.	Kantor Camat Indralaya Utara				1		3				3	2	6					15
4.	Kantor CamatKandis						1		1			2	2	1				7
5.	Kantor Camat Lubuk Keliat								1			2	2	2				7
6.	Kantor Camat Muara Kuang			1		1	4		1	1	2	2	5	1				16
7.	Kantor Camat Payaraman						4				2		5		1			12
8.	Kantor Camat Pemulutan			1		2		3	3		3	1	6					19
9.	Kantor Camat Pemulutan Barat						1				1	4	3					9
10.	Kantor Camat Pemulutan Selatan					2	1	2		1	1	1	2	1				11
11.	Kantor Camat Rambang Kuang					2	3				1	2	3	1				12
12.	Kantor Camat Rantau Alai							1		1	1		5	1				9
13.	Kantor Camat Rantau Panjang			1		1	1			1	1	1	2	1				9
14.	Kantor Camat Sungai Pinang						1				2	2	3	2				10
15.	Kantor Camat Tanjung Batu							5	1	1	1	2	3	1	1			15
16.	Kantor Camat Tanjung Raja					3		4	1		1	3	5	1				18
17.	Kantor Lurah Indralaya Indah								1		2	1	1					5
18.	Kantor Lurah Indralaya Mulya									1	2	3						6
19.	Kantor Lurah Indralaya Raya								1		4		2					7
20.	Kantor Lurah Muara Kuang								1			4	1					6
21.	Kantor Lurah Payaraman Barat						1				3			1				5
22.	Kantor Lurah Payaraman Timur								1		1	2	1					5
23.	Kantor Lurah Sungai Pinang											1	2					3
24.	Kantor Lurah Tanjung Batu											1		1				2
25.	Kantor Lurah Tanjung Batu Timur							1		1		3						5
26.	Kantor Lurah Tanjung Raja										3	1						4
27.	Kantor Lurah Tanjung Raja Barat										1		1					2
28.	Kantor Lurah Tanjung Raja Timur										1	1	1					3
29.	Kantor Lurah Tanjung Raja Utara					1					3		1					5
30.	Kantor Lurah Timbangan										2	2	1					5
	Total			4	1	12	25	20	12	8	41	44	60	17	2			246

sumber data : Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Tahun 2016

D. CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

Berdasarkan kegiatan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2016. PMPRB sendiri merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Berdasarkan penilaian yang dilakukan tersebut, pemenuhan target indikator internal yang mencerminkan pencapaian program dan kegiatan RB Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

target kinerja ini dimunculkan pada tahun 2016 untuk mengukur sejauh mana perkembangan pelaksanaan RB di Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2016 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Gambaran singkat tentang kedudukan, Tugas pokok dan fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta sistematika penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

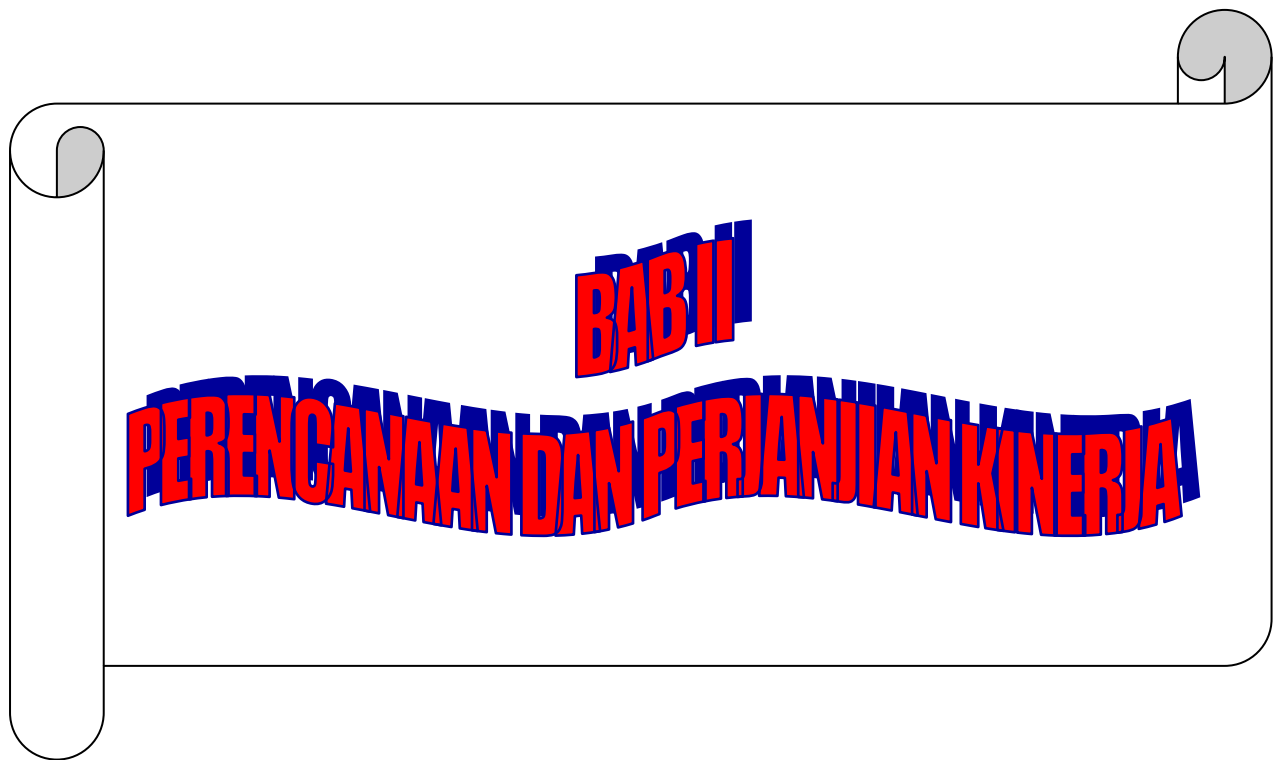
Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2016 yang mendasar pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2016. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016; perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun 2015. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target 2016 berdasarkan dokumen RPJMD Tahun 2010-2016, untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan standar nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja pemerintah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2016 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam rangka peningkatan Kinerja.

A decorative graphic of a scroll with a black outline and grey rollers at the top and bottom. The text is centered on the scroll.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERIANJIAN KINERJA

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Perjanjian Kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi; peningkatan kualitas pelayanan publik; percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi.

Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2016 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 07 tahun 2010 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010 – 2015 dan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2015 . Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2016. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk mencapainya dalam tahun 2016. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review laporan kinerja instansi pemerintah.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 4 . Perjanjian Kinerja 2016

“Terwujudnya Masyarakat Ogan Ilir yang lebih maju, mandiri dan berkualitas menuju sejahtera berlandaskan iman, Taqwa, Moral dan Etika”

No	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas SDM Aparat	1.	Tingkat Penyelesaian pelanggaran kedisiplinan pegawai	%	100
		2.	Proporsi aparat berdasarkan tingkatan pendidikan a. SD b. SLTP c. SLTA d. D1-D3 e. S1 f. S2 g. S3	%	03 03 25 34,3 37,5 4,55 0,05
		3.	Aparat yang mendapatkan diklat a. Struktural b. Fungsional	%	3,87 3,78
2.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan	1.	Berkurangnya ketidak puasan/komplain masyarakat	%	5
		2.	Penyelesaian izin lokasi%	%	100
		3.	Penyelesaian kasus tanah negara/daerah	%	100
3.	Meningkatnya efisiensi birokrasi	1.	Prosentase tingkat kualitas pelayanan publik	%	83
4.	Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan masyarakat	1.	Ketersediaan organisasi perangkat daerah sesuai kebutuhan	%	100
		2.	Luas tanah yang bersertifikat	%	15,75
		3.	Kepemilikan KTP	%	69,2
		4.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	%	94,24
		5.	Ketersediaan peraturan perundang-undangan daerah	%	90
5.	Meningkatnya kemampuan keuangan dan kekayaan daerah	1.	Prosentase peningkatan pendapatan daerah	%	20
		2.	Sumbangan PAD terhadap APBD	%	4
6.	Meningkatnya informasi dan komunikasi manajemen pemerintahan dan akses pemanfaatannya	1.	Banyaknya jenis sistem informasi manajemen yang dimiliki pemda	Buah	9
		2.	Ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi	%	55
		3.	Ketersediaan data yang akurat	%	90
7.	Meningkatnya kerjasama daerah	1.	Peningkatan intensitas kerjasama	Buah	26
8.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan daerah	1.	Peningkatan kegiatan penelitian	%	15
9.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan	1.	Jumlah PKK aktif	%	100
		2.	Posyandu aktif	%	100
		3.	Terhimpunnya swadaya masyarakat	%	92
10.	Menurunnya kasus pelanggaran hukum	1.	Penurunan angka pelanggaran hukum	%	5
11.	Menurunnya kasus gangguan keamanan dan ketertiban	1.	Angka kriminalitas	%	5
12.	Meningkatnya kualitas partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan politik	1.	Partisipasinya dalam pemilu presiden dan wakil presiden		85
		2.	Partisipasi masyarakat dalam pemilu DPRD, DPD, DPRD	%	85
		3.	Partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur	%	90
		4.	Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah	%	90
		5.	Jumlah kegiatan pembinaan politik	Buah	5

13.	Meningkatnya akses pendidikan yang merata bagi semua anak usia sekolah	1.	Angka partisipasi kasar TK/PAUD	%	63,74		
		2.	Angka partisipasi kasar SD	%	107,86		
		3.	Angka partisipasi kasar SLTP	%	104,4		
		4.	Angka partisipasi kasar SLTA	%	72,74		
		5.	Angka partisipasi murni SD	%	99,37		
		6.	Angka partisipasi murni SLTP	%	86,63		
		7.	Angka partisipasi murni SLTA	%	86,01		
		8.	Angka melek huruf	%	98,5		
		9.	Rata-rata lama sekolah	tahun	13		
		10.	Rasio murid SD - Ruang belajar	%	28		
		11.	Rasio murid SLTP-Ruang belajar	%	30		
		12.	Rasio murid SLTA-Ruang belajar	%	30		
14.	Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan	1.	Nilai rata-rata UASBN	%	6,5		
		2.	Angka kelulusan SD/MI	%	100		
		3.	Angka kelulusan SLTP	%	100		
		4.	Angka kelulusan SLTA	%	100		
		5.	Angka mengulang SD/MI	%	0		
		6.	Angka mengulang SLTP	%	0		
		7.	Angka mengulang SLTA	%	0		
		8.	Guru yang memiliki kualifikasi S1/DIV	%	46,39		
		9.	Guru yang memiliki sertifikasi	%	90		
15.	Meningkatnya kualitas manajemen pendidikan dan pencitraan publik	1.	Jumlah sekolah standar nasional a. SD / MI b. SLTP / MTs c. SLTA / MA / SMK	buah buah buah	10 16 10		
		2.	Jumlah sekolah standar internasional a. SLTP / MTs b. SLTA / MA / SMK	buah buah	1 1		
		3.	Program Inklusive a. SD / MI b. SLTP / MTs c. SLTA / MA / SMK	buah buah buah	5 3 2		
		16.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.	Umur harapan hidup	Tahun	69
		2.	Angka kematian bayi	Per 1000 kelahiran hidup	0		
		3.	Angka kematian ibu melahirkan	Per 1000 kelahiran hidup	5		
17.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan	4.	Prevalensi gizi buruk	Orang	5		
		1.	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100		
		2.	Persentase balita ditimbang berat badannya	%	90		
		3.	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	%	97		
		4.	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	%	100		
		5.	Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal	%	96,0		
		6.	Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin	%	100		
		7.	Cakupan pelayanan kesehatan bayi	%	100		
		8.	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita	%	100		
18.	Meningkatnya keluarga sejahtera	9.	Persentase persalinan pada anak remaja	%	4		
		1.	Prevalensi KB aktif	%	70		
		2.	Prevalensi kasus HIV	%	<5		
		3.	Pusat informasi konseling kesehatan reproduksi remaja	%	100		
		4.	Prosentase keluarga prasejahtera dan sejahtera 1	%	42		

		5.	Meningkatnya cakupan desa siaga aktif	%	85
		6.	Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS	%	98
		7.	Persentase yang tidak terpenuhi kebutuhan alkon	%	0
19.	Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan generasi muda serta olahraga	1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Buah	169
		2.	Atlit lokal yang sukses	Orang	6
		3.	Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	%	1,52
20.	Meningkatnya indikator makro ekonomi daerah	1.	Pertumbuhan ekonomi PDRB atas dasar harga konstan a. Dengan Migas b. Tanpa Migas	%	7,39 2,000,520 1,870,977
		2.	PDRB perkapita atas dasar harga konstan a. Dengan Migas b. Tanpa Migas		9,750,000 9,655,304
21.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi barang dan Jasa	1.	Produktivitas padi	Ton/Ha	4,12
		2.	Produktivitas jagung	Ton/Ha	5,183
		3.	Produktivitas kedele	Ton/Ha	1514
			Produktivitas perkebunan karet	Ton	42,50
		5.	Produktivitas perkebunan sawit	ton	96,50
		6.	Produktivitas Daging	Ton	1.998,06
		7.	Produktivitas telur	butir	2.054,82
		8.	Produksi Ikan Budidaya	Ton	76,115,00
		9.	Produksi Ikan Tangkap	Ton	1.013,33
22.	Meningkatnya peran masyarakat kewirausahaan serta dalam	1.	Jumlah POKMASWAN	Kelompok	48
		2.	Sukakeswan	Orang	64
		3.	Jumlah usaha peternakan mandiri	Kelompok	64
		4.	Jumlah usaha perikanan mandiri	Kelompok	12
		5.	Prosentase koperasi aktif	%	20
		6.	Prosentase Usaha Kecil Menengah	%	83,36
23.	Kerjasama perdagangan dan iklim investasi yang baik	1.	Prosentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	62,50
		2.	Pertumbuhan industri	%	62,5
		3.	Prosentase kenaikan / penurunan nilai investasi	%	2,5
24.	Meningkatnya kesejahteraan pekerja	1.	Kesesuaian upah dengan UMR	%	80
		2.	Penanganan perselisihan perburuhan	%	100
		3.	Keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	%	100
25.	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	1.	Angka partisipasi angkatan kerja	%	68,82
		2.	Prosentase pekerja yang ditempatkan	%	59,41
		3.	Penurunan angka pengangguran	%	3,3
26.	Meningkatnya kualitas perencanaan, penataan dan pemanfaatan ruang	1.	Prosentase kesesuaian program pembangunan dengan RTRW	%	80
		2.	Ketersediaan spm bidang penataan ruang	%	60
		3.	Prosentase kawasan yang memiliki rencana tata ruang rinci / RTBL	%	55
27.	Meningkatnya kualitas pengelolaan SDA dan kualitas lingkungan hidup	1.	Perusahaan yang memiliki IPAL	%	100
		2.	Penurunan kasus pencemaran lingkungan	buah	100
		3.	Perusahaan yang memiliki dokumen UKL,UPL dan AMDAL	%	100
		4.	Luas hutan rakyat	Ha	9,990
		5.	Hutan dan taman kota	Ha	95
		6.	Berkurangnya luasan lahan kritis	%	1,5

28.	Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana perhubungan darat dan sungai	1.	Jalan kabupaten dengan kondisi baik	%	90,55
		2.	Jembatan dengan kondisi baik	%	92
		3.	Pertumbuhan sarana dan prasarana perhubungan	%	5
		4.	Ketersediaan rambu lalu lintas	%	3,6
29.	Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan pemukiman	1.	Rumah layak huni	%	87
		2.	Proporsi luas kawasan kumuh	%	15
		3.	Rumah tangga yang memiliki sanitasi (jamban keluarga)	%	85
		4.	Banyak sambungan air bersih (SRT)	%	43
		5.	Jumlah desa yang belum memperoleh sambungan listrik	%	0
30.	Meningkatnya sarana dan prasarana pengairan	1.	Prosentase luas irigasi kabupaten yang baik	%	67,16
31.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas hidup PMKS	1.	Proporsi penyandang PMKS terhadap penduduk	kk	220
		2.	Prosentase penurunan anak terlantar	%	0,48
		3.	Prosentase penurunan angka kemiskinan	%	13,5
32.	Menurunnya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki	1.	Indeks Pembangunan Gender	%	80
33.	Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	1.	Proporsi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	3
34.	Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat	1.	Konflik suku, agama, ras dan golongan (SARA)	%	0
35.	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia	1.	Meningkatnya sarana peribadatan	%	5
		2.	Meningkatnya jumlah jemaah haji	%	4
36.	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah	1.	Pengelolaan kekayaan dan peningkatan keragaman serta pengembangan nilai budaya	%	75

Jumlah APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016: Rp. 1.218.280.615.446,48



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2016 telah dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan serta masih mendasarkan pada format pengukuran kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016. Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sebagai kota yang "lebih maju, mandiri dan berkualitas menuju sejahtera berlandaskan iman, taqwa, moral dan Etika. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan sebagai berikut :

Tabel 5 : Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Kinerja	Nilai Realisasi	Kriteria Kinerja	Penilaian Realisasi
1.		$91 \geq$		Sangat Tinggi
2.		$76 \leq 90$		Tinggi
3.		$66 \leq 75$		Sedang
4.		$51 \leq 65$		Rendah
5		≤ 50		Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2016 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Tabel 6 . Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja 2016

No	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
1.	Meningkatnya kualitas SDM Aparat	1.	Tingkat Penyelesaian pelanggaran kedisiplinan pegawai	%	100	100	
		2.	Proporsi aparat berdasarkan tingkatan pendidikan a. SD b. SLTPSLTA c. D1-D3 d. S1 e. S2 f. S3	%	03 03 25 34,3 37,5 4,55 0,05	0 05 24.7 24.6 45.2 4.05 0	133 166 98.8 71.7 120 89 0
		3.	Aparat yang mendapatkan diklat a. Struktural b. Fungsional	%	3,87 3,78	3 0	77.5 0
2.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan	1.	Berkurangnya ketidak puasan/komplain masyarakat	%	5	3	60
		2.	Penyelesaian izin lokasi%	%	100		
		3.	Penyelesaian kasus tanah negara/daerah	%	100		
3.	Meningkatnya efisiensi birokrasi	1.	Prosentase tingkat kualitas pelayanan publik	%	83	78	93
4.	Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan masyarakat	1.	Ketersediaan organisasi perangkat daerah sesuai kebutuhan	%	100	100	100
		2.	Luas Tanah yang bersertifikat	%	15,75	13.5	85
		3.	Kepemilikan KTP	%	69,2	83	119
		4.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	%	94,24	82	87
		5.	Ketersediaan peraturan perundang-undangan daerah	%	90		
5.	Meningkatnya kemampuan keuangan dan kekayaan daerah	1.	Prosentase peningkatan pendapatan daerah	%	20		
		2.	Sumbangan PAD terhadap APBD	%	4		
6.	Meningkatnya informasi dan komunikasi manajemen pemerintahan dan akses pemanfaatannya	1.	Banyaknya jenis sistem informasi manajemen yang dimiliki pemda	Buah	9		
		2.	Ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi	%	55		
		3.	Ketersediaan data yang akurat	%	90	85	94
7.	Meningkatnya kerjasama daerah	1.	Peningkatan intensitas kerjasama	Buah	26	23	88,5

8.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan daerah	1.	Peningkatan kegiatan penelitian	%	15	15	100
9.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan	1.	Jumlah PKK aktif	%	100		
		2.	Posyandu aktif	%	100		
		3.	Terhimpunnya swadaya masyarakat	%	60		
10.	Menurunnya kasus pelanggaran hukum	1.	Penurunan angka pelanggaran hukum	%	5		
11.	Menurunnya kasus gangguan keamanan dan ketertiban	1.	Angka kriminalitas	%	5		
12.	Meningkatnya kualitas partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan politik	1.	Partisipasi masyarakat dalam pemilu presiden dan wakil presiden		85	0	
		2.	Partisipasi masyarakat dalam pemilu DPRD, DPD, DPRD	%	85	0	
		3.	Partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur	%	90	0	
		4.	Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah	%	90	77,6	
		5.	Jumlah kegiatan pembinaan politik	Buah	5		
13.	Meningkatnya akses pendidikan yang merata bagi semua anak usia sekolah	1.	Angka partisipasi kasar TK/PAUD	%	60	57,33	95,55
		2.	Angka partisipasi kasar SD	%	100	103,10	103,1
		3.	Angka partisipasi kasar SLTP	%	100	98,77	98,77
		4.	Angka partisipasi kasar SLTA	%	71	67,61	
		5.	Angka partisipasi murni SD	%	98	86,33	88,09
		6.	Angka partisipasi murni SLTP	%	80,25	77,71	96,83
		7.	Angka partisipasi murni SLTA	%	72,74	57,72	79,4
		8.	Angka melek huruf	%	98,5	99,99	101,5
		9.	Rata-rata lama sekolah	tahun	13		
		10.	Rasio murid SD - Ruang belajar	%	28	23	82
		11.	Rasio murid SLTP-Ruang belajar	%	30	29	96
		12.	Rasio murid SLTA-Ruang belajar	%	30	29,5	98
14.	Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan	1.	Nilai rata-rata UASBN	%	6,5	198,77	
		2.	Angka kelulusan SD/MI	%	100	100	100
		3.	Angka kelulusan SLTP	%	100	99,99	99,99
		4.	Angka kelulusan SLTA	%	100	99,96	99,96
		5.	Angka mengulang SD/MI	%	0	0	0
		6.	Angka mengulang SLTP	%	0	0	0
		7.	Angka mengulang SLTA	%	0	0	0
		8.	Guru yang memiliki kualifikasi S1/DIV	%	80	76,89	96,11
		9.	Guru yang memiliki sertifikasi	%	72,00	73,24	101,72

15.	Meningkatnya kualitas manajemen pendidikan dan pencitraan publik	1.	Jumlah sekolah standar nasional d. SD / MI e. SLTP / MTs f. SLTA / MA / SMK	buah buah buah	10 15 10		
		2.	Jumlah sekolah standar internasional a. SLTP / MTs b. SLTA / MA / SMK	buah buah	1 1		
		3.	Program Inklusive a. SD / MI b. SLTP / MTs c. SLTA / MA / SMK	buah buah buah	5 3 2		
16.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.	Umur harapan hidup	Tahun	64.41 thn	64	
		2.	Angka kematian bayi	Per 1000 kelahiran hidup	1	68	6.8
		3.	Angka kematian ibu melahirkan	Per 1000 kelahiran hidup	4	8	200
		4.	Prevalensi gizi buruk	Orang	17	0.38	2.24
		5.	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	%	100	100	100
17.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan	1.	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	97.10	97.10
		2.	Persentase balita ditimbang berat badannya	%	90	65.70	82.13
		3.	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	%	96	95.29	99
		4.	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	%	100	100	100
		5.	Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal	%	95,0	93.78	98.72
		6.	Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin	%	80	100	125
		7.	Cakupan pelayanan kesehatan bayi	%	95	93.10	98.00
		8.	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita	%	85	99	116
		9.	Persentase persalinan pada anak remaja	%	4		

18.	Meningkatnya keluarga sejahtera	1.	Prevalensi KB aktif	%	60,8	72,36	119,01
		2.	Prevalensi kasus HIV	%	<5	1	20
		3.	Pusat informasi konseling kesehatan reproduksi remaja	%	100	75	75
		4.	Prosentase keluarga prasejahtera dan sejahtera 1	%	56,72	67,34	81,27
		5.	Meningkatnya cakupan desa siaga aktif	%	80	93,78	117,23
		6.	Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS	%	90	85	94,44
		7.	Persentase yang tidak terpenuhi kebutuhan alkon	%	0		
19.	Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan generasi muda serta olahraga	1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Buah	169		
		2.	Atlit lokal yang sukses	Orang	6		
		3.	Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	%	1,52		
20.	Meningkatnya indikator makro ekonomi daerah	1.	Pertumbuhan ekonomi PDRB atas dasar harga konstan a. Dengan Migas b. Tanpa Migas	%	7	6,85	97,85
				Rp	2,000,520	2.151,227	107,5
		2.	PDRB perkapita atas dasar harga konstan a. Dengan Migas b. Tanpa Migas	Rp	9.344,696	5.401,361	57,80
				Rp	9.107.103	5.274.418	57,92
21.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi barang dan jasa	1.	Produktivitas padi	Ton/Ha	4,1		
		2.	Produktivitas jagung	Ton/Ha	5,115		
		3.	Produktivitas kedele	Ton/Ha	1,493		
		4.	Produktivitas perkebunan karet	ton	42,50	21.859	51,4
		5.	Produktivitas perkebunan sawit	ton	96,50		
		6.	Produktivitas daging	Ton	3.223,59	2.341,74	72,64
		7.	Produktivitas telur	butir	3.396,40	3.246,73	95,59
		8.	Produksi ikan budidaya	ton	8.178,88	7.945,20	97,14
		9.	Produksi ikan tangkap	ton	8.605,50	8.341,11	96,93
22.	Meningkatnya peras serta masyarakat dalam kewirausahaan	1.	Jumlah POKMASWAN	Kelompok	48		
		2.	Sukakeswan	Orang	35	26	74,28
		3.	Jumlah usaha peternakan mandiri	Kelompok	64		
		4.	Jumlah usaha perikanan mandiri	Kelompok	12		
		5.	Prosentase koperasi aktif	%	20	80,9	404,2
		6.	Prosentase Usaha Kecil Menengah	%	83,36	95,57	114

23.	Kerjasama perdagangan dan iklim investasi yang baik	1.	Prosentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	62,50	14,33	22,9
		2.	Pertumbuhan industri	%	62,5	6,07	9,7
		3.	Prosentase kenaikan / penurunan nilai investasi	%	2,5		
24.	Meningkatnya kesejahteraan pekerja	1.	Kesesuaian upah dengan UMR	%	80	100	125
		2.	Penanganan perselisihan perburuhan	%	100	99,95	99,95
		3.	Keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	%	100	100	100
25.	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	1.	Angka partisipasi angkatan kerja	%	68,32	100	146,37
		2.	Prosentase pekerja yang ditempatkan	%	59,41	98,3	165,46
		3.	Penurunan angka pengangguran	%	3,3	2,8	99,73
26.	Meningkatnya kualitas perencanaan, penataan dan pemanfaatan ruang	1.	Prosentase kesesuaian program pembangunan dengan RTRW	%	70	70	100
		2.	Ketersediaan smp bidang penataan ruang	%	50	60	120
		3.	Prosentase kawasan yang memiliki rencana tata ruang rinci / RTBL	%	40	45	112.5
27.	Meningkatnya kualitas pengelolaan SDA dan kualitas lingkungan hidup	1.	Perusahaan yang memiliki IPAL	%	100		
		2.	Penurunan kasus pencemaran lingkungan	buah	100		
		3.	Perusahaan yang memiliki dokumen UKL,UPL dan AMDAL	%	100		
		4.	Luas hutan rakyat	Ha	9,990		
		5.	Hutan dan taman kota	%	90		
		6.	Berkurangnya luasan lahan kritis	%	1,5		
28.	Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana perhubungan darat dan sungai	1.	Jalan kabupaten dengan kondisi baik	%	90		
		2.	Jembatan dengan kondisi baik	%	90		
		3.	Pertumbuhan sarana dan prasarana perhubungan	%	5		
		4.	Ketersediaan rambu lalu lintas	%	3,6		
29.	Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan pemukiman	1.	Rumah layak huni	%	87	67,54	77,63
		2.	Proporsi luas kawasan kumuh	%	15	8,38	55,86
		3.	Rumah tangga yang memiliki sanitasi (jamban keluarga)	%	85	53,82	63.3
		4.	Banyak sambungan air bersih (SRT)	%	43	52,66	122,5
		5.	Jumlah desa yang belum memperoleh sambungan listrik	%	0		
30.	Meningkatnya sarana dan prasarana pengairan	1.	Prosentase luas irigasi kabupaten yang baik	%	67,16		

31.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas hidup PMKS	1.	Proporsi penyandang PMKS terhadap penduduk	kk	19.669	15,669	79.6
		2.	Prosentase penurunan anak terlantar	%	100	35	35
		3.	Prosentase penurunan angka kemiskinan	%	18.844	10,196	54,11
32.	Menurunnya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki	1.	Indeks Pembangunan Gender	%	70	0	0
33.	Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	1.	Proporsi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	7	5	71,42
34.	Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat	1.	Konflik suku, agama, ras dan golongan (SARA)	%	0	0	0
35.	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia	1.	Meningkatnya sarana peribadatan	%	5		
		2.	Meningkatnya jumlah jemaah haji	%	4		
36.	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah	1.	Pengelolaan kekayaan dan peningkatan keragaman serta pengembangan nilai budaya	%	75	95	126

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Hingga akhir tahun 2016 yang seharusnya menggunakan RPJMD transisi karena Kabupaten Ogan Ilir mengalami pergantian Bupati baru di Tahun 2016 bulan April, jadi untuk tahun anggaran 2016 RPJMD transisi tidak ada maka diambil kebijakan menggunakan RJPP. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuannya melalui 36 (tiga puluh enam sasaran strategis dan 126 (seratus dua puluh enam indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun Perjanjian Kinerja tahun 2016. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 36 (tiga puluh enam) sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- I. Sasaran strategis 1 s/d 12 yang merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2010-2016 yaitu **“Meningkatkan kualitas dan profesionalisme Aparatur dalam tata kelola Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat”**

1. Meningkatkan Kualitas SDM.

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2014	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Tingkat penyelesaian penyelenggaraan kedisiplinan Pegawai	50	85	100	69.5	69.5
2.	Proporsi Aparat berdasarkan Tingkatan Pendidikan					
	a. SD		04	03	0	133
	b. SLTP		052	03	05	166
	c. SLTA		24.7	25	24.7	98.8
	d. D1-D3		24.6	34,3	24.6	71.7
	e. S1		45.2	37.5	45.2	120
	f. S2		4.3	4,55	4.05	89
	g. S3		0	0,05	0	0
3.	Aparat yang mendapatkan diklat					
	a. Struktural		7	3,87	3	77.5
	b. Fungsional		180	3,78	0	0

Pada tahun 2016 capaian indikator kinerja sasaran belum mencapai sepenuhnya karena beberapa faktor yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Persentase keberhasilan tahun 2016 menitik beratkan pada pelaksanaan dan fungsi struktur organisasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menuju yang lebih baik di mana tahun 2016 ini SKPD mengalami pembaharuan struktur organisasi.

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2016	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Berkurangnya ketidakpuasan/komplain masyarakat	5	5	5	4	80
2.	Penyelesaian izin lokasi	100	100	100	100	100
3.	Penyelesaian kasus tanah/negara/daerah					

Indikator Kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya seperti di atas. Ketiga indikator kesemuanya dapat mencapai 100 %.

3. Meningkatkan efisiensi birokrasi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2016	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Prosentase tingkat kualitas pelayanan publik	77	77	80	77	96

Target indikator sasaran dapat digolongkan baik. Hal ini disebabkan pelaksanaan administrasi yang dilaksanakan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP).

4. Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2016	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Ketersediaan organisasi perangkat Daerah sesuai kebutuhan		100	100	100	100
2.	Luas tanah yang bersertifikat		13,5	15		65
3.	Kepemilikan KTP		24,86	69,2	82	119

4.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk		22,49	93,74	83	89
5.	Ketersediaan Peraturan Perundang-undangan	85	85	90	85	94

Capaian target indikator sasaran tersebut diatas belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dikarenakan perlu peningkatan partisipasi masyarakat yang berdomisili di desa-desa yang terletak jauh dari ibukota kecamatan.

5. Meningkatkan kemampuan keuangan dan kekayaan daerah

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2016	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Prosentase peningkatan pendapatan daerah	42,90	42,90	20	10	50
2.	Sumbangan PAD terhadap APBD	2,47	42,68	5	3	75

Hasil capaian pada sasaran ini diharapkan dapat menunjang perekonomian daerah

6. Meningkatkan informasi dan komunikasi manajemen pemerintahan dan akses pemanfaatannya

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2014	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1	Banyaknya sistem informasi manajemen yang dimiliki pemda		9	9	9	100
2.	Ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi		45	50	45	90

Perbandingan capaian indikator tahun 2016 hampir mencapai 100 % capaian indikator sasaran tersebut antara lain :

1. Meningkatnya pelayanan informasi dan pemberitaan yang berimbang di tengah masyarakat tentang pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir
2. Meningkatnya akses pelayanan informasi dan pemberitaan yang di butuhkan masyarakat.
3. Menciptakan sarana / media informasi internet tentang Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang dapat di akses oleh seluruh masyarakat dengan menyediakan website kabupaten
4. Mensosialisasikan program Kabupaten Ogan Ilir kepada masyarakat.
5. Mendokumentasikan pemberitaan media massa mengenai kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Tersedianya produk-produk kajian Kabupaten Ogan Ilir.

7. Meningkatkan kerjasama daerah

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2014	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Peningkatan Intensitas kerjasama	85	85	25	85	85

8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan daerah

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2014	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Peningkatan kegiatan penelitian	21	15	15	13	86

Capaian pada sasaran ini terlihat pada tersusunnya hasil kajian dan penelitian yang dilaksanakan pelajar dan mahasiswa terhadap Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan.

9. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2014	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah PKK aktif	100	100	100		
2.	Posyandu aktif	100	100	100		
3.	Terhimpunnya swadaya masyarakat	54	56	60	56	

10. Menurunkan kasus pelanggaran hukum

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2014	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Penurunan angka pelanggaran hukum	5	5	5		

11. Menurunkan kasus gangguan keamanan dan ketertiban

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2014	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Angka kriminalitas	5	5	5		

Dalam hal pencapaian target atas indikator kinerja penurunan angka kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum pemerintah kabupaten Ogan Ilir tidak terlepas dari kerjasama dengan pihak kepolisian.

12. Meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik.

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2014	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Partisipasi dalam pemilu presiden dan wakil presiden	75	0	80	0	0
2.	Partisipasi masyarakat dalam pemilu DPR, DPD, DPRD	75	0	80	0	0
3.	Partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur	80	0	85	0	0
4.	Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah	0	83,75	85	77,6	91,3
5.	Jumlah kegiatan pembinaan politik	5	5	5	2	40

Indikator sasaran di atas tercapai karena adanya pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir periode tahun 2016- 2021

II. Sasaran strategis 1 s/d 7 yang merupakan salah satu upaya mencapai misi Kedua sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2010-2016 yaitu **"Meningkatkan Pelayanan kesehatan , kualitas Pendidikan dan Kecerdasan Masyarakat."**

1. Meningkatkan akses pendidikan yang merata bagi semua usia sekolah

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2014	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Angka partisipasi kasar TK/PAUD	43,57	53,31	60	57,33	95,5
2.	Angka partisipasi kasar SD	104,67	102,79	100	103,10	103,1
3.	Angka partisipasi kasar SLTP	99,94	99,95	100	98,77	98,77
4.	Angka partisipasi kasar SLTA	72,87	79,06	71	67,61	95,22
5.	Angka partisipasi murni SD	97,80	97,86	98	86,33	88
6.	Angka partisipasi murni SLTP	79,55	81,04	80,25	77,71	96,8
7.	Angka partisipasi murni SLTA	57,75	59,61	85	57,72	79,4
8.	Angka melek huruf	99,99	99,9	98,5	99,99	98,5
9.	Rata-rata lama sekolah	10	9	12		
10.	Rasio murid SD - Ruang belajar	24	26	28	23	82
11.	Rasio murid SLTP-Ruang belajar	30	29	30	29	96,6
12.	Rasio murid SLTA-Ruang belajar	30	32	30	29.5	98

2. Meningkatkan mutu dan kualitas Pendidikan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2014	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai rata-rata UASBN	97	6,88	6,5		
2.	Angka kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100
3.	Angka kelulusan SLTP	100	100	100	99,99	99,99
4.	Angka kelulusan SLTA	99,99	99,98	100	99,96	99,96
5.	Angka mengulang SD/MI	2,4	0,03	0	0	0
6.	Angka mengulang SLTP	0,11	0,002	0	0	0
7.	Angka mengulang SLTA	0,24	0,003	0	0	0
8.	Guru yang memiliki kualifikasi S1/DIV	156,6	76,89	80	76,89	96
9.	Guru yang memiliki sertifikasi	98,1	71,68	72,00	73,24	101,7

3. Meningkatkan kualitas manajemen pendidikan dan pencitraan publik

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2014	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah sekolah standar nasional					
	a. SD / MI	0	10	10		
	b. SLTP / MTs	5	15	15		
	c. SLTA / MA / SMK	0	10	10		
2.	Jumlah sekolah standar internasional					
	a. SLTP / MTs	0	1	1		
	b. SLTA / MA / SMK	0	1	1		
3	Program Inklusive					
	a. SD / MI	7	5	5		
	b. SLTP / MTs	0	3	3		
	c. SLTA / MA / SMK	0	2	2		

4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2014	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Umur harapan hidup	67	66,97	69	64	
2.	Angka kematian bayi	43	29	0	68	6.8
3.	Angka kematian ibu melahirkan	10	7	5	8	200
4.	Prevalensi gizi buruk	17	22	5	0.38	2.24
5.	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100	100	100	100	100

5. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2014	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	90	97,5	100	97.10	97.10
2.	Persentase balita ditimbang berat badannya	90	65,8	90	65.70	82.13

3.	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	96,6	92,2	96	95.29	99
4.	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan		85,7	100	100	100
5.	Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal	93,8	93,8	95,0	93.78	98.72
6.	Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin	58,8	58,8	100	100	125
7.	Cakupan pelayanan kesehatan bayi		92,2	100	93.10	98.00
8.	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita		85,7	100	99	116
9.	Persentase persalinan pada anak remaja		0,16	5		

6. Meningkatkan keluarga sejahtera

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2014	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Prevalensi KB aktif	2	4	60,8	72,36	119,01
2.	Prevalensi kasus HIV	29	-	<5	1	20
3.	Pusat informasi konseling kesehatan reproduksi remaja	73,33	100	100	75	75
4.	Prosentase keluarga prasejahtera dan sejahtera 1	49,37	56,72	56,72	67,34	81,27
5.	Meningkatnya cakupan desa siaga aktif			85	93.78	117.23
6.	Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS	52	80	98	85	94.44
7.	Persentase yang tidak terpenuhi kebutuhan alkon			0		

7. Meningkatnya pembinaan dan dan pemberdayaan generasi muda serta olahraga

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2014	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	137	47	169		
2.	Atlit lokal yang sukses	22	73	6		
3.	Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	1,25	1,52	1,52		

III. Sasaran strategis 1 s/d 6 yang merupakan salah satu upaya mencapai misi Ketiga sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2010-2016 yaitu **“Meningkatkan perekonomian masyarakat berdasarkan keunggulan lokal.”**

1. Meningkatnya indikator makro ekonomi daerah

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2014	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Pertumbuhan ekonomi PDRB atas dasar harga konstan	6,91	6,85	7,39	6.61	94.4
	a. Dengan Migas	1,995,000	2.151.227	2,000,520	1.905.257	88.5
	b. Tanpa Migas	1,966,000	2.100.669	1,870,977	2.100.669	112
2.	PDRB perkapita atas dasar harga konstan					
	a. Dengan Migas	5.078.969	5,401.361	9,750,000	5.401,361	57,80
	b. Tanpa Migas	5.004.384	5.274.418	9,655,304	5.274.418	57,92

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi barang dan jasa

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2014	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Produktivitas padi	4.498	3.791	4.12		
2.	Produktivitas jagung	3.688	4.220	5,183		
3.	Produktivitas kedele	1,480	1.505	1514		
4.	Produktivitas perkebunan karet	28.421,87	22.590,07	42.50		
5.	Produktivitas perkebunan sawit	22.802,52	21.483,12	96.50		
6.	Produktivitas daging	3.534,69	2.151,96	2.263,98	1.127,84	49,81
7.	Produktivitas telur	1.165,42	3.086,73	3.261,27	1.980,30	60,72
8.	Produksi ikan budidaya	7.571,44	7.789,41	8.178,88	7.945,20	97,14
9.	Produksi ikan tangkap	8.413,92	8.195,72	8.605,50	8.341,11	96,93

3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kewirausahaan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2014	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah POKMASWAN	45	46	48		
2.	Sukakeswan	30	32	35	0	
3.	Jumlah usaha peternakan mandiri	7	8	64		
4.	Jumlah usaha perikanan mandiri	122	14	12		
5.	Prosentase koperasi aktif	80,7	81	20	80,9	404,2
6.	Prosentase Usaha Kecil Menengah	74,03	74,31	83,36	95,57	114

4. Kerjasama perdagangan dan iklim investasi yang baik

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2014	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Prosentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	10	10,48	62,50	14,33	22,9
2.	Pertumbuhan industri	63,2	61,5	62,5	6,07	9,7
3.	Prosentase kenaikan / penurunan nilai investasi	2	2,59	2,5	0.26	10

5. Meningkatnya kesejahteraan pekerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2014	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Kesesuaian upah dengan UMR	100	125	80	100	125
2.	Penanganan perselisihan perburuhan	100	100	100	99,95	99,95
3.	Keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	100	100	100	100	100

6. Meningkatnyakompetensi tenaga kerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2014	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Angka partisipasi angkatan kerja	100	100	68,82	100	146,37
2.	Prosentase pekerja yang ditempatkan	83,26	100	59	98,3	165,46
3.	Penurunan angka pengangguran	3,98	100	3,5	2,8	99,73

IV. Sasaran strategis 1 s/d 5 yang merupakan salah satu upaya mencapai misi Keempat sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2010-2016 yaitu **"Meningkat Kualitas infrastruktur Wilayah guna memperlancar aktivitas kehidupan dan Perekonomian Masyarakat."**

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, penataan ruang dan pemanfaatan ruang

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2016	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Prosentase kesesuaian program pembangunan dengan RTRW	75	70	80	70	87.5
2.	Ketersediaan spm bidang penataan ruang	100	60	60	50	83.3
3.	Prosentase kawasan yang memiliki rencana tata ruang rinci / RTBL	50	45	55	45	81.8

2. Meningkatnya kualitas pengelolaan SDA dan kualitas lingkungan hidup

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2016	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Perusahaan yang memiliki IPAL	90	92	100		
2.	Penurunan kasus pencemaran lingkungan	100	90	100		
3.	Perusahaan yang memiliki dokumen UKL,UPL dan AMDAL	85	90	100		
4.	Luas hutan rakyat	200	200	9,99		
5.	Hutan dan taman kota	70	25	95		
6.	Berkurangnya luasan lahan kritis	1,9	2,54	1,5		

3. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana perhubungan darat dan sungai

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2016	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jalan kabupaten dengan kondisi baik	87	88	90,55		
2.	Jembatan dengan kondisi baik	83	87	92		
3.	Pertumbuhan sarana dan prasarana perhubungan	5	5	5		
4.	Ketersediaan rambu lalu lintas	3,6	3,6	3,6		

4. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2016	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Rumah layak huni	46,20	51,75	87	67,54	77,63
2.	Proporsi luas kawasan kumuh	11,30	9,29	15	8,38	55,86
3.	Rumah tangga yang memiliki sanitasi (jamban keluarga)	49,43	50,56	85	53,82	63,3
4.	Banyak sambungan air bersih (SRT)	36,62	49,91	43	52,66	122,5
5.	Jumlah desa yang belum memperoleh sambungan listrik	1,7	1,7	0		

5. Meningkatnya sarana dan prasarana pengairan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2016	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Prosentase luas irigasi kabupaten yang baik	13,01	15,60	67,16		

- V. Sasaran strategis 1 s/d 6 yang merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2010-2016 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, sosial Budaya dan Ketentraman Masyarakat.”**

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas hidup PMKS

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2016	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Proporsi penyandang PMKS terhadap penduduk	487	490	220	15,669	125,52
2.	Prosentase penurunan anak terlantar	1,5	1,8	048	35	285,71
3.	Prosentase penurunan angka kemiskinan	15	16	13,5	10,196	54,11

2. Menurunnya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2016	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Pembangunan Gender	40	0	80	70	0

3. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2016	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Proporsi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	3	47	7	5	71,42

4. Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2016	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Konflik suku, agama, ras, dan golongan (SARA)	0	0	0	0	0

5. Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2016	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya sarana peribadatan	5	5	5		
2.	Meningkatnya jumlah jemaah haji	3	4	4	4	100

6. Meningkatnya pelestarian pengembangan kebudayaan daerah

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2016	
		2016	2015	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Pengelolaan kekayaan dan peningkatan keragaman serta pengembangan nilai budaya			75	95	126,6

C. REALISASI KEUANGAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 36 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat di lihat sebagai berikut :

Tabel 7. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Capaian Realisasi	% Realisasi	Pagu/Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas SDM Aparat	Tingkat Penyelesaian pelanggaran kedisiplinan pegawai	100	100	100	23.443.134.500	21.121.701.643	90.09
		Proporsi aparat berdasarkan tingkatan pendidikan						
		a. SD	03	133	04			
		b. SLTP	03	166	05			
		c. SLTA	25	98.8	24.7			
		d. D1-D3	34,3	71.72	24.6			
e. S1	37.5	120	45.2					
f. S2	4,55	89	4.05					
h. S3	0,05	0	0					
		Aparat yang mendapatkan diklat						
		a. Struktural			3			
		b. Fungsional	3,87		0			
			3,78					
2.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan	Berkurangnya ketidakpuasan/complain masyarakat	5			1.213.392.700	1.079.889.520	88.9
		Penyelesaian izin lokasi	100					
		Penyelesaian kasus tanah Negara/daerah	100					
3.	Meningkatnya efisiensi birokrasi	Prosentase tingkat kualitas pelayanan publik	80	75	93.75	4.938.686.050	1.710.844.000	34.6

4.	Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan masyarakat	Ketersediaan organisasi perangkat daerah sesuai kebutuhan	100			95.582.293.926	83.724.435.245	87.5
		Luas Tanah yang bersertifikat	15,75					
		Kepemilikan KTP	69,2	82	119			
		Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	94,24	83	89			
		Ketersediaan peraturan perundang-undangan daerah	90	85	94			
5.	Meningkatnya kemampuan keuangan dan kekayaan daerah	Prosentase peningkatan pendapatan daerah	20	10	50	4.399.026.600	3.243.006.968	73.7
		Sumbangan PAD terhadap APBD	4	3	75			
6.	Meningkatnya informasi dan komunikasi manajemen pemerintahan dan akses pemanfaatannya	Banyaknya jenis sistem informasi manajemen yang dimiliki pemda	9	9	100	3.407.820.600	3.151.459.830	92.47
		Ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi	55	45	90			
		Ketersediaan data yang akurat	90	87	96.6			
7.	Meningkatnya kerjasama daerah	Peningkatan intensitas kerjasama daerah	26	24	92.3	393.000.000	327.298.000	83.28
8.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan daerah	Peningkatan kegiatan penelitian	15	15	100	2.406.300.000	2.219.522.980	92.23
9.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan	Jumlah PKK aktif	100			13.401.045.150	10.673.022.652	79.64
		Posyandu aktif	100					
		Terhimpunnya swadaya masyarakat	60					
10.	Menurunnya kasus pelanggaran hukum	Penurunan angka pelanggaran hukum	5			542.900.000	489.263.300	90.12
11.	Menurunnya kasus gangguan keamanan dan ketertiban	Angka kriminalitas	5			697.675.000	462.768.450	66.33
12.	Meningkatnya kualitas partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan politik	Partisipasi masyarakat dalam pemilu presiden dan wakil presiden	85	0	0	361.150.000	284.520.000	78.78
		Partisipasi masyarakat dalam pemilu DPRD, DPD, DPRD	85	0	0			
		Partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur	90	0	0			
		Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah	90	77,6	91,3			
		Jumlah kegiatan pembinaan politik	5	2	40			

13.	Meningkatnya akses pendidikan yang merata bagi semua anak usia sekolah	Angka partisipasi kasar TK/PAUD	60	57,33	95,5	11.639.743.046	8.154.540.568	70.05
		Angka partisipasi kasar SD	100	103,10	103,1			
		Angka partisipasi kasar SLTP	100	98,77	98,77			
		Angka partisipasi kasar SLTA	71	67,61	95,22			
		Angka partisipasi murni SD	98	86,33	88			
		Angka partisipasi murni SLTP	80,25	77,71	96,8			
		Angka partisipasi murni SLTA	72,74	57,72	79,4			
		Angka melek huruf	98,5	99,99	98,5			
		Rata-rata lama sekolah	13					
		Rasio murid SD - Ruang belajar	28	23	82			
		Rasio murid SLTP-Ruang belajar	30	29	96,6			
		Rasio murid SLTA-Ruang belajar	30	29.5	98			
		14.	Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan	Nilai rata-rata UASBN	6,5			
Angka kelulusan SD/MI	100			100	100			
Angka kelulusan SLTP	100			99,99	99,99			
Angka kelulusan SLTA	100			99,96	99,96			
Angka mengulang SD/MI	0			0	0			
Angka mengulang SLTP	0			0	0			
Angka mengulang SLTA	0			0	0			
Guru yang memiliki kualifikasi S1/DIV	80			76,89	96			
Guru yang memiliki sertifikasi	72,00			73,24	101,7			
15.	Meningkatnya kualitas manajemen pendidikan dan pencitraan publik	Jumlah sekolah standar nasional				10.589.515.248	4.329.372.389	40.88
		a. SD / MI	10					
		b. SLTP / MTs	15					
		c. SLTA / MA / SMK	10					
		Jumlah sekolah standar internasional	1					
		a. SLTP / MTs	1					
		b. SLTA / MA / SMK						
Program Inklusive								
a. SD / MI	5							
b. SLTP / MTs	3							
c. SLTA / MA / SMK	2							

16.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur harapan hidup	64.4	64		46.668.266.812	22.259.665.145	47.69
		Angka kematian bayi	0	68	6.8			
		Angka kematian ibu melahirkan	5	8	200			
		Prevalensi gizi buruk	5	0.38	2.24			
		Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100	100	100			
17.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	97.10	97.10	14.345.343.209	9.576.924.315	66.75
		Persentase balita ditimbang berat badannya	90	65.70	82.13			
		Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	96	95.29	99	14.345.343.209	9.576.924.315	66.75
		Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100	100	100			
		Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal	95,0	93.78	98.72			
		Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin	100	100	125			
		Cakupan pelayanan kesehatan bayi	100	93.10	98.00			
		Cakupan pelayanan kesehatan anak balita	100	99	116			
		Persentase persalinan pada anak remaja	4					
18.	Meningkatnya keluarga sejahtera	Prevalensi KB aktif	70	98.18	122.73	933.840.000	690.605.000	73.95
		Prevalensi kasus HIV	<5	<0.005	0.01			
		Pusat informasi konseling kesehatan reproduksi remaja	100					
		Prosentase keluarga prasejahtera dan sejahtera 1	44	0				
		Meningkatnya cakupan desa siaga aktif	80	93.78	117.23			
		Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS	98	85	94.44			
		Persentase yang tidak terpenuhi kebutuhan alkon	0					

19.	Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan generasi muda serta olahraga	Persentase organisasi pemuda yang aktif	169			593.000.000	583.554.000	98.40
		Atlit lokal yang sukses	6					
		Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	1,52					
20.	Meningkatnya indikator makro ekonomi daerah	Pertumbuhan ekonomi PDRB atas dasar harga konstan a. Dengan Migas b. Tanpa Migas	7 2.151.227 1,870,977	6.61 1.905.257 2.100.669	94.4 88.5 112	756.800.000	187.061.730	24.71
		PDRB perkapita atas dasar harga konstan a. Dengan Migas b. Tanpa Migas	9.344,696 9.107.103	5.401,361 5.274.418	57,80 57,92			
21.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi barang dan jasa	Produktivitas padi	4,1			3.641.226.595	2.802.886.031	76.97
		Produktivitas jagung	5,115					
		Produktivitas kedele	1,493					
		Produktivitas perkebunan karet	42,50					
		Produktivitas perkebunan sawit	96,50					
		Produktivitas daging	2.263,98	1.127,84	49,81			
		Produktivitas telur	3.261,27	1.980,30	60,72			
		Produksi ikan budidaya	8.178,88	7.945,20	97,14			
Produksi ikan tangkap	8.605,50	8.341,11	96,93					
22.	Meningkatnya peras serta masyarakat dalam kewirausahaan	Jumlah POKMASWAN	48			611.000.000	319.280.313	52.25
		Sukakeswan	64					
		Jumlah usaha peternakan mandiri	64					
		Jumlah usaha perikanan mandiri	12					
		Prosentase koperasi aktif	20	80,9	404,2			
23.	Kerjasama perdagangan dan iklim investasi yang baik	Prosentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	62,50	14,33	22,9	497.592.000	348.571.880	70,05
		Pertumbuhan industri	62,5	6,07	9,7			
		Prosentase kenaikan / penurunan nilai investasi	2,5	0.26	10.4			

24.	Meningkatnya kesejahteraan pekerja	Kesesuaian upah dengan UMR	80	100	125	4.625.903.200	4.368.280.200	94.43
		Penanganan perselisihan perburuhan	100	99,95	99,95			
		Keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	100	100	100			
25.	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Angka partisipasi angkatan kerja	68,32	100	146,37	2.200.800.000	2.171.207.400	98.65
		Prosentase pekerja yang ditempatkan	59,41	98,3	165,46			
		Penurunan angka pengangguran	3,3	2,8	99,73			
26.	Meningkatnya kualitas perencanaan, penataan dan pemanfaatan ruang	Prosentase kesesuaian program pembangunan dengan RTRW	70	70	87.5	2.106.540.000	1.755.534.193	83.337
		Ketersediaan spm bidang penataan ruang	50	50	83.3			
		Prosentase kawasan yang memiliki rencana tata ruang rinci / RTBL	55	45	81.8			
27.	Meningkatnya kualitas pengelolaan SDA dan kualitas lingkungan hidup	Perusahaan yang memiliki IPAL	100			47.772.806.740	35.133.724.658	73.54
		Penurunan kasus pencemaran lingkungan	100					
		Perusahaan yang memiliki dokumen UKL,UPL dan AMDAL	100					
		Luas hutan rakyat	9,990					
		Hutan dan taman kota	90					
28.	Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana perhubungan darat dan sungai	Berkurangnya luasan lahan kritis	1,5			175.156.279.000	159.153.832.416	
		Jalan kabupaten dengan kondisi baik	90					
		Jembatan dengan kondisi baik	90					
		Pertumbuhan sarana dan prasarana perhubungan	5					
		Ketersediaan rambu lalu lintas	3,6					
29.	Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan pemukiman	Rumah layak huni	87	77,63	67,54	16.657.839.030	14.242.077.336	90.86
		Proporsi luas kawasan kumuh	25	33,52	8,38			
		Rumah tangga yang memiliki sanitasi (jamban keluarga)	80	67,27	53,82			
		Banyak sambungan air bersih (SRT)	65	81,02	52,66			
		Jumlah desa yang belum memperoleh sambungan listrik	0	0	0			

30.	Meningkatnya sarana dan prasarana pengairan	Prosentase luas irigasi kabupaten yang baik	19.669	15,669	125,52	11.115.990.050	7.823.640.350	70,38
31.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas hidup PMKS	Proporsi penyandang PMKS terhadap penduduk	100	35	285,71	1.774.050.000	1.444.983.450	81,45
		Prosentase penurunan anak terlantar	18.844	10,196	54,11			
		Prosentase penurunan angka kemiskinan	13,5					
32.	Menurunnya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki	Indeks Pembangunan Gender	70	0	0	0	0	0
33.	Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Proporsi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	3			0	0	0
34.	Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat	Konflik suku, agama, ras dan golongan (SARA)	0	0	0	0	0	0
35.	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia	Meningkatnya sarana peribadatan	5	0	0	0	0	0
		Meningkatnya jumlah jemaah haji	4					
36.	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah	Pengelolaan kekayaan dan peningkatan keragaman serta pengembangan nilai budaya	75	95	126	372.300.000	346.152.100	92,97
TOTAL BELANJA LANGSUNG						504.517.764.457,47	405.225.426.581,30	80,32
BELANJA TIDAK LANGSUNG						948.771.240.655,48	700.805.932.884,00	73,86
TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH						1.542.879.089.106,21	1.246.237.125.047,52	80,77

D. CAPAIAN PRESTASI DAN PERHARGAAN

Capaian prestasi dan penghargaan yang di raih pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan meraih penghargaan WDP (Wajar Dengan Pengecualian)



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2016. Dengan kata lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir selama tahun 2016 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan dalam RPJMD 2016-2021 dan telah memenuhi 36 (tiga puluh enam) sasaran strategisnya sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 34 indikator kinerja sasaran, 2 indikator tidak dihitung karena kedua indikator tersebut masih dalam proses penilaian Pemerintah Pusat, yaitu pada indikator penilaian audit eksternal dengan target Wajar belum dapat terealisasi karena masih dalam proses audit BPK yang akan dimulai pada awal bulan April 2016. dan indikator nilai EKPPD yang sampai saat ini penilaian di tingkat nasional masih dalam proses. Sehingga ada 32 indikator sasaran strategis yang diukur capaian kinerjanya yaitu ada 27 indikator atau 84,37% telah mencapai kategori sangat tinggi, 2 indikator kinerja sasaran strategis atau 6,25% telah mencapai kategori tinggi, 2 indikator kinerja sasaran strategis atau 6,25% telah mencapai kategori sedang dan 1 indikator kinerja sasaran strategis atau 3,12% telah mencapai kategori sangat rendah. Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 1.542.879.089.106,211.246.237.125.047,52 jumlah tersebut telah direalisasi sebesar Rp1.246.237.125.047,52 atau 80,77% (un audit per tanggal 11 Maret 2015). Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2016 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Pemerintah

Kabupaten Ogan Ilir akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2016 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya. Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

LAMPIRAN 1

Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran Indikator Kinerja	Kinerja		Program	Pagu	Anggaran		
					Realisasi	%			Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
1	Meningkatnya kualitas SDM Aparat	Tingkat Penyelesaian pelanggaran kedisiplinan pegawai	100		100						
		Proporsi aparat berdasarkan tingkatan pendidikan									
		a. SD	03		04						
		b. SLTP	03		05						
2	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan	c. SLTA	25		24.7						
		d. D1-D3	34,3		24.6						
		e. S1	37.5		45.2						
		f. S2	4,55		4.05						
		g. S3	0,05		0						
		Aparat yang mendapatkan diklat									
		a. Struktural	3,87		3						
b. Fungsional	3,78		0								
3	Meningkatnya efisiensi birokrasi	Berkurangnya ketidakpuasan/complain masyarakat	5	Adanya Survey Kepuasan masyarakat di RSUD dan Kantor Pelayanan Perizinan							
		Penyelesaian izin lokasi	100								
		Penyelesaian kasus tanah Negara/daerah	100								
3	Meningkatnya efisiensi birokrasi	Prosentase tingkat kualitas pelayanan publik	83	Melakukan Penilaian pelayanan Publik ke SKPD yang melakukan	75	93.75					

				elayanan langsung ke masyarakat						
4.	Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan masyarakat	Ketersediaan organisasi perangkat daerah sesuai kebutuhan	100	Adanya perda ttg organisasi perangkat daerah						
		Luas Tanah yang bersertifikat	15,75							
		Kepemilikan KTP	69,2	Melayani pembuatan e-KTP langsung ke desa-desa						
		Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	94,24	Melayani pembuatan akta						
		Ketersediaan peraturan perundang-undangan daerah	90							
5.	Meningkatnya kemampuan keuangan dan kekayaan daerah	Prosentase peningkatan pendapatan daerah	20		10	50				
		Sumbangan PAD terhadap APBD	4	Melakukan Penagihan langsung ke lapangan terhadap WP	3	75				
6.	Meningkatnya informasi dan komunikasi manajemen pemerintahan dan akses pemanfaatannya	Banyaknya jenis sistem informasi manajemen yang dimiliki pemda	9							
		Ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi	55							
		Ketersediaan data yang akurat	90		87	96.6				
7.	Meningkatnya kerjasama daerah	Peningkatan intensitas kerjasama	26		24	92.3				
8.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam	Peningkatan kegiatan penelitian	15		15	100				

	penyusunan perencanaan dan kebijakan daerah									
9.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan	Jumlah PKK aktif	100							
		Posyandu aktif	100							
		Terhimpunnya swadaya masyarakat	60							
10.	Menurunnya kasus pelanggaran hukum	Penurunan angka pelanggaran hukum	5							
11.	Menurunnya kasus gangguan keamanan dan ketertiban	Angka kriminalitas	5							
12.	Meningkatnya kualitas partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan politik	Partisipasi masyarakat dalam pemilu presiden dan wakil presiden	85		0	0				
		Partisipasi masyarakat dalam pemilu DPRD, DPD, DPRD	85		0	0				
		Partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur	90		0	0				
		Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah	90		77,6	91,3				
		Jumlah kegiatan pembinaan politik	5		2	40				
13.	Meningkatnya akses pendidikan yang merata bagi semua anak usia sekolah	Angka partisipasi kasar TK/PAUD	60		57,33	95,5				
		Angka partisipasi kasar SD	100		103,10	103,1				
		Angka partisipasi kasar SLTP	100		98,77	98,77				
		Angka partisipasi kasar SLTA	71		67,61	95,22				
		Angka partisipasi murni SD	98		86,33	88				
		Angka partisipasi murni SLTP	80,25		77,71	96,8				
		Angka partisipasi murni SLTA	72,74		57,72	79,4				
		Angka melek huruf	98,5		99,99	98,5				
		Rata-rata lama sekolah	13							
		Rasio murid SD - Ruang belajar	28		23	82				
Rasio murid SLTP-Ruang belajar	30		29	96,6						

		Rasio murid SLTA-Ruang belajar	30		29.5	98				
14.	Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan	Nilai rata-rata UASBN	6,5							
		Angka kelulusan SD/MI	100		100	100				
		Angka kelulusan SLTP	100		99,99	99,99				
		Angka kelulusan SLTA	100		99,96	99,96				
		Angka mengulang SD/MI	0		0	0				
		Angka mengulang SLTP	0		0	0				
		Angka mengulang SLTA	0		0	0				
		Guru yang memiliki kualifikasi S1/DIV	80		76,89	96				
		Guru yang memiliki sertifikasi	72,00		73,24	101,7				
15.	Meningkatnya kualitas manajemen pendidikan dan pencitraan publik	Jumlah sekolah standar nasional	10							
		d. SD / MI	15							
		e. SLTP / MTs	10							
		f. SLTA / MA / SMK								
		Jumlah sekolah standar internasional	1							
		a. SLTP / MTs	1							
		b. SLTA / MA / SMK								
		Program Inklusive								
		a. SD / MI	5							
		b. SLTP / MTs	3							
		c. SLTA / MA / SMK	2							
16.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur harapan hidup	69		64					
		Angka kematian bayi	0		68	6.8				
		Angka kematian ibu melahirkan	5		8	200				
		Prevalensi gizi buruk	5		0.38	2.24				
		Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100		100	100				
17.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100		97.10	97.10				
		Persentase balita ditimbang berat badannya	90		65.70	82.13				
		Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	96		95.29	99				
		Persentase balita gizi buruk yang mendapat	100		100	100				

		perawatan							
		Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal	95,0		93.78	98.72			
		Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin	100		100	125			
		Cakupan pelayanan kesehatan bayi	100		93.10	98.00			
		Cakupan pelayanan kesehatan anak balita	100		99	116			
		Persentase persalinan pada anak remaja	4						
18.	Meningkatnya keluarga sejahtera	Prevalensi KB aktif	70		98.18	122.73			
		Prevalensi kasus HIV	<5		<0.005	0.01			
		Pusat informasi konseling kesehatan reproduksi remaja	100						
		Prosentase keluarga prasejahtera dan sejahtera 1	44		0				
		Meningkatnya cakupan desa siaga aktif	80		93.78	117.23			
		Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS	98		85	94.44			
		Persentase yang tidak terpenuhi kebutuhan alkon	0						
19.	Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan generasi muda serta olahraga	Persentase organisasi pemuda yang aktif	169						
		Atlit lokal yang sukses	6						
		Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	1,52						
20.	Meningkatnya indikator makro ekonomi daerah	Pertumbuhan ekonomi PDRB atas dasar harga konstan	7		6.61	94.4			
		a. Dengan Migas	2,000,520		1.905.257	88.5			
		b. Tanpa Migas	1,870,977		2.100.669	112.1			
		PDRB perkapita atas							

		dasar harga konstan								
		a. Dengan Migas	9.344,696		5.401,361	57,80				
		b. Tanpa Migas	9.107.103		5.274.418	57,92				
21.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi barang dan jasa	Produktivitas padi	4,1							
		Produktivitas jagung	5,115							
		Produktivitas kedele	1,493							
		Produktivitas perkebunan karet	42,50							
		Produktivitas perkebunan sawit	96,50							
		Produktivitas daging	2.263,98		1.127,84	49,81				
		Produktivitas telur	3.261,27		1.980,30	60,72				
		Produksi ikan budidaya	8.178,88		7.945,20	97,14				
		Produksi ikan tangkap	8.605,50		8.341,11	96,93				
22.	Meningkatnya peras serta masyarakat dalam kewirausahaan	Jumlah POKMASWAN	48							
		Sukakeswan	64							
		Jumlah usaha peternakan mandiri	64							
		Jumlah usaha perikanan mandiri	12							
		Prosentase koperasi aktif	20		80,9	404,2				
		Prosentase Usaha Kecil Menengah	83,36		95,57	114				
23.	Kerjasama perdagangan dan iklim investasi yang baik	Prosentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	62,50		14,33	22,9				
		Pertumbuhan industri	62,5		6,07	9,7				
		Prosentase kenaikan / penurunan nilai investasi	2,5		0,26	10,4				
24.	Meningkatnya kesejahteraan pekerja	Kesesuaian upah dengan UMR	80		80	100				
		Penanganan perselisihan perburuhan	100		100	99,95				
		Keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	100		100	100				
25.	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Angka partisipasi angkatan kerja	68,32		68,32	100				
		Prosentase pekerja yang ditempatkan	59,41		59,41	98,3				
		Penurunan angka pengangguran	3,3		3,3	2,8				
26.	Meningkatnya kualitas perencanaan, penataan dan pemanfaatan	Prosentase kesesuaian program pembangunan dengan RTRW	70		70	70				
		Ketersediaan spm bidang penataan ruang	50		50	50				

	ruang	Prosentase kawasan yang memiliki rencana tata ruang rinci / RTBL	55		55	45				
27.	Meningkatnya kualitas pengelolaan SDA dan kualitas lingkungan hidup	Perusahaan yang memiliki IPAL	100							
		Penurunan kasus pencemaran lingkungan	100							
		Perusahaan yang memiliki dokumen UKL,UPL dan AMDAL	100							
		Luas hutan rakyat	9,990							
		Hutan dan taman kota	90							
		Berkurangnya luasan lahan kritis	1,5							
28.	Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana perhubungan darat dan sungai	Jalan kabupaten dengan kondisi baik	90							
		Jembatan dengan kondisi baik	90							
		Pertumbuhan sarana dan prasarana perhubungan	5							
		Ketersediaan rambu lalu lintas	3,6							
29.	Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan dan pemukiman	Rumah layak huni	87		67,54					
		Proporsi luas kawasan kumuh	25		8,38					
		Rumah tangga yang memiliki sanitasi (jamban keluarga)	80		53,82					
		Banyak sambungan air bersih (SRT)	65		52,66					
		Jumlah desa yang belum memperoleh sambungan listrik	0							
30.	Meningkatnya sarana dan prasarana pengairan	Prosentase luas irigasi kabupaten yang baik	19.669		125,52					
31.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas hidup PMKS	Proporsi penyandang PMKS terhadap penduduk	100		285,71					
		Prosentase penurunan anak terlantar	18.844		54,11					
		Prosentase penurunan angka kemiskinan	13,5							
32.	Menurunnya kesenjangan antara perempuan	Indeks Pembangunan Gender	70							

	dan laki-laki									
33.	Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Proporsi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	3							
34.	Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat	Konflik suku, agama, ras dan golongan (SARA)	0							
35.	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia	Meningkatnya sarana peribadatan	5							
		Meningkatnya jumlah jemaah haji	4							
36.	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah	Pengelolaan kekayaan dan peningkatan keragaman serta pengembangan nilai budaya	75							

Lampiran 1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir

Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Bertambah/berkurang	%
Pendapatan Daerah	1.542.879.089.106,21	1.246.237.125.047,52	-296.641.964.058,69	80,77
Pendapatan Asli Daerah	370.255.859.937,21	112.809.053.302,07	-257.446.806.635,14	30,47
Pajak Daerah	229.830.499.453,73	62.843.668.168,00	-166.986.831.285,73	27,34
Retribusi Daerah	47.600.880.113,00	4.385.865.468,13	-43.215.014.644,87	9,21
Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.000.000.000,00	3.172.960.673,56	-1.827.039.326,44	63,46
Lain-lain Pendapatan yang sah	87.824.480.370,48	42.406.558.992,38	-45.417.921.378,10	48,29
Dana Perimbangan	1.003.987.373.969,00	939.412.494.416,00	-64.574.879.553,00	93,57
Dana bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	143.495.513.969,00	145.102.605.373,00	1.607.091.404,00	101,12
Dana Alokasi Umum	623.839.463.000,00	623.839.463.000,00	0,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	236.652.397.000,00	170.470.426.043,00	-66.181.970.957,00	72,03
Lain-lain Pendapatan yang sah	168.635.855.200,00	194.015.577.329,45	25.379.722.129,45	115,05
Pendapatan Hibah	1.500.000.000,00	1.811.423.923,00	311.423.923,00	120,76
Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	15.660.857.000,00	12.464.067.400,00	-3.196.789.600,00	79,59
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5.000.000.000,00	5.722.980.000,00	722.980.000,00	114,46
Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah lainnya	15.660.857.000,00	12.464.067.400,00	-3.196.789.600,00	79,59
Pendapatan lainnya	137.920.919.000,00	137.868.740.600,00	-52.178.400,00	99,96
Jumlah Pendapatan	1.542.879.089.106,21	1.246.237.125.047,52	-296.641.964.058,69	80,77

Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Bertambah/berkurang	%
Belanja Daerah	1.542.879.089.106,21	1.246.237.125.047,52	-296.641.964.058,69	80,77
BELANJA TIDAK LANGSUNG	948.771.240.655,48	700.805.932.884,00	-247.965.307.771,48	73,86
Belanja Pegawai	719.305.578.707,48	529.092.344.404,00	-190.213.234.303,48	73,56
Belanja Hibah	14.618.845.500,00	9.739.022.000,00	-4.879.823.500,00	66,62
Belanja Bantuan Sosial	1.276.007.773,00	1.064.713.680,00	-211.294.093,00	83,44
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	734.847.375,00	200,00	-734.847.175,00	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	211.835.961.300,00	160.909.852.600,00	-50.926.108.700,00	75,96
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	0,00
Belanja Langsung	504.517.764.457,47	405.225.426.581,30	-99.292.337.876,17	80,32
Jumlah belanja	1.542.879.089.106,21	1.246.237.125.047,52	-296.641.964.058,69	80,77
Surplus/Defisit	89.590.083.993,26	140.205.765.582,22	50.615.681.588,96	156,50

Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Bertambah/berkurang	%
Pembiayaan Daerah				
Penerimaan Pembiayaan	62.910.652.906,74	35.812.927.196,12	-27.097.725.710,62	56,93
Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya	35.812.927.196,12	35.812.927.196,12	0,00	100,00
Penerimaan Piutang Daerah	27.097.725.710,62	0,00	-27.097.725.710,62	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	62.910.652.906,74	35.812.927.196,12	-27.097.725.710,62	56,93
Pengeluaran Pembiayaan	152.500.736.900,00	152.500.022.900,00	-714.000,00	100,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	750.000.000,00	749.286.000,00	-714.000,00	99,90
Pembayaran Pokok Hutang	151.750.736.900,00	151.750.736.900,00	0,00	100,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	152.500.736.900,00	152.500.022.900,00	-714.000,00	100,00
Pembiayaan Netto	-89.590.083.993,26	-116.687.095.703,88	-27.097.011.710,62	130,25